

Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Hasan Basri, Syaparuddin, Junaidi

Program Magister Ilmu Ekonomi Fak. Ekonomi Universitas Jambi

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Struktur PAD dan APBD berdasarkan komposisinya, (2) Pertumbuhan PAD serta kontribusinya terhadap APBD dan (3) Kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam melaksanakan otonomi daerah. Hasil penelitian antara lain menyimpulkan bahwa komposisi PAD terbesar berasal dari penerimaan lain-lain yang sah yaitu 42,32%; komposisi terbesar dari APBD bersumber dari dana perimbangan sebesar 83,49%. Rata-rata pertumbuhan PAD kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebesar 18,48%; rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebesar 6,33%. Kemampuan keuangan daerah, Kabupaten Batang Hari, Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun yang memiliki status kemampuan keuangan tinggi dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi.

Kata Kunci : Pemetaan PAD, Kinerja keuangan daerah, Growth, Share dan Elasticity.

PENDAHULUAN

Otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, karena pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Namun harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal daerah di Indonesia masih rendah, artinya daerah belum mampu membiayai pengeluaran rutinnya. Otonomi daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai keuangan yang efektif. Pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD (Radianto, 1997 ; A Halim , 2001). Realitas hubungan fiskal antara daerah dan pusat, ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini terlihat jelas dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan dibandingkan dengan total subsidi yang didrop dari pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar

kecilnya PAD yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD pada APBD, menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan beberapa daerah menghadapi kesulitan menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri. Di satu sisi, mobilisasi sumber daya keuangan untuk membiayai pelbagai aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Namun demikian, mobilisasi sumber dana secara berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kondusif.

Keragaman potensi sumber penerimaan daerah menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam penerimaan PAD, hal ini perlu diminimalisir sehingga perlu dilakukan pemetaan PAD. Sehingga penulis memandang perlu dilakukan pengkajian secara mendalam mengenai kemampuan keuangan daerah, dalam bentuk peta pendapatan asli daerah dan mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Kinerja PAD Kabu-paten/ Kota di Provinsi Jambi; (2) Kemampuan keuangan daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi dalam melaksanakan otonomi daerah

METODE ANALISIS

1. Pemetaan Kinerja PAD

Kinerja PAD diukur dari pertumbuhan PAD dan kontribusinya terhadap APBD. Selanjutnya, pemetaan PAD dengan klasifikasi :

Kuadran	Kondisi
I	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> disertai nilai <i>growth</i> yang tinggi.
II	Kondisi ini belum ideal, tapi daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD. Sumbangan PAD terhadap APBD masih rendah namun pertumbuhan (<i>growth</i>) PAD tinggi.
III	Kondisi ini belum ideal. Peran PAD yang besar dalam APBD punya peluang mengecil karena pertumbuhan PADnya kecil. Di sini sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
IV	Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah belum punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD rendah.

2. Kemampuan keuangan daerah

Dianalisis dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

a. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) merupakan rata-rata hitung dari Indeks Pertumbuhan (*Growth*), Indeks Elastisitas, dan Indeks *Share*. Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. Menyusun indeks untuk setiap komponen IKK dilakukan dengan menggunakan persamaan umum (Deddyk, 2003)

$$Indeks X = \frac{X - nilai\ min\ imum}{nilai\ maksimum - nilai\ min\ imum}$$

Selanjutnya Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dirumuskan sebagai berikut :

$$IKK = \frac{X_G + X_E + X_S}{3}$$

Keterangan:

X_G = Indeks Pertumbuhan (PAD)

X_E = Indeks Elastisitas (Belanja Pembangunan terhadap PAD)

X_S = Indeks *Share* (PAD terhadap APBD)

Nilai IKK Kabupaten/Kota diurut dimulai dari yang mempunyai kemampuan keuangan terbesar, mempunyai kemampuan keuangan *sedang*, Dan mempunyai kemampuan keuangan *rendah*.

b. Tingkat kemandirian daerah

Tingkat kemandirian daerah diukur dengan menggunakan rumus (Usman, 2011):

$$TKD = \frac{PAD}{TPT}$$

Keterangan :

TKD = Tingkat kemandirian daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPT = Total penerimaan transfer

c. Pola hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2001) mengemukakan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu: 1). *Instruktif*; 2). *Konsultatif*; 3). *Partisipatif*; 4). *Deligatif*

Bertolak dari teori tersebut, sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) diberikan sebagai berikut :

Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
≤ 25	Rendah Sekali	Tidak mampu.	Instruktif
25 – 50	Rendah	Kurang mandiri.	Konsultatif
51 – 75	Sedang	Cukup mandiri.	Partisipatif
76 - 100	Tinggi	Sudah mandiri.	Deligatif

d. Tingkat Ketergantungan daerah

Tingkat ketergantungan daerah diukur dengan menggunakan rumus:

$$TKtD = \frac{PT}{TPD}$$

Keterangan :

TKtD = Tingkat ketergantungan daerah

PT = Penerimaan transfer

TPD = Total penerimaan daerah

Selanjutnya tingkat ketergantungan daerah ini diklasifikasi sebagai berikut:

Rasio (%)	Kesimpulan
≤ 25	Ketergantungan fiskal dinyatakan sangat kecil berarti kinerja anggaran sangat baik.
25 – 50	Ketergantungan fiskal dinyatakan cukup baik, yang berarti kinerja anggaran cukup baik.
51 – 75	Ketergantungan fiskal dinyatakan cukup besar yang berarti kinerja anggaran kurang baik.
76 – 100	Ketergantungan fiskal dinyatakan sangat besar yang berarti kinerja anggaran sangat buruk sekali.

d. Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Pemetaan kemampuan keuangan Daerah, menggunakan dua indikator yaitu tingkat kemandirian daerah dan tingkat ketergantungan daerah, yang diklasifikasikan sebagai berikut;

Uraian	TKtD _i > TKD	TKtD _i < TKD
TKD _i > TKD	Wilayah mandiri dengan tingkat Ketergantungan tinggi	Wilayah Mandiri dengan tingkat ketergantungan rendah
TKD _i < TKD	Wilayah belum mandiri dan tingkat ketergantungan tinggi	Wilayah belum Mandiri dan tingkat Ketergantungan rendah.

Keterangan;

TKD_i = Tingkat kemandirian daerah i

TKtD_i = Tingkat ketergantungan daerah i

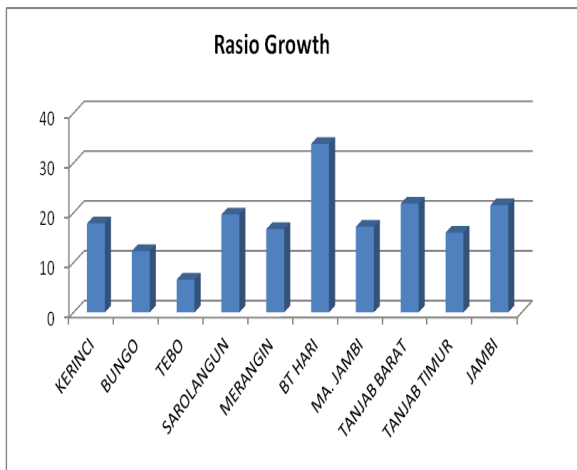
TKD = rata-rata tingkat kemandirian daerah

TKtD = rata-rata tingkat ketergantungan daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan PAD

Rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi adalah 18.48%. Dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, seluruh pertumbuhan PAD-nya *positip* dalam kurun waktu tahun 2007-2011. Pertumbuhan rata-rata PAD cukup besar terjadi di Kabupaten Batang Hari (33,81%); diikuti Kabupaten Tanjung Jabung Barat (21,82%); Kota Jambi (2,51); Kabupaten Sarolangun (20,95%), Kabupaten Keinci (17,86);Kabupaten Muara Jambi (17,20%), Kabupaten Merangin (16,73%), Kabupaten Tanjung jabung timur (16,00%), Kabupaten Bungo (12,32%), dan yang terendah pada kabupaten Tebo (6,59%).



Gambar 1. Rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2007 s/d 2011

Kontribusi PAD terhadap APBD

Kemampuan daerah membiayai belanja daerah dapat dilihat dari rasio antara PAD dengan APBD. Semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi belum mampu untuk membiayai seluruh kebutuhan belanja daerahnya dari PAD. Rata-rata rasio PAD terhadap APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode tahun 2007 - 2011 adalah 6,33%. Adapun rasio PAD terhadap APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang berada diatas rata-rata yang terbesar yaitu Kabupaten Sarolangun sebesar 12,65%, diikuti Kota Jambi pada posisi ke dua sebesar 10,51%, Kabupaten Bungo pada posisi ketiga sebesar 9,28%. Sementara kabupaten/kota lainnya berada dibawah rata-rata adalah Kabupaten Merangin sebesar 5,47%; Kabupaten Kerinci sebesar 4,74%; Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 4,70%; Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 4,68%; Kabupaten Batang Hari sebesar 4,17%; Kabupaten Tebo sebesar 3,78%; dan yang terendah adalah Kabupaten Muaro Jambi yaitu sebesar 3,38%.

Pemetaan Kinerja PAD

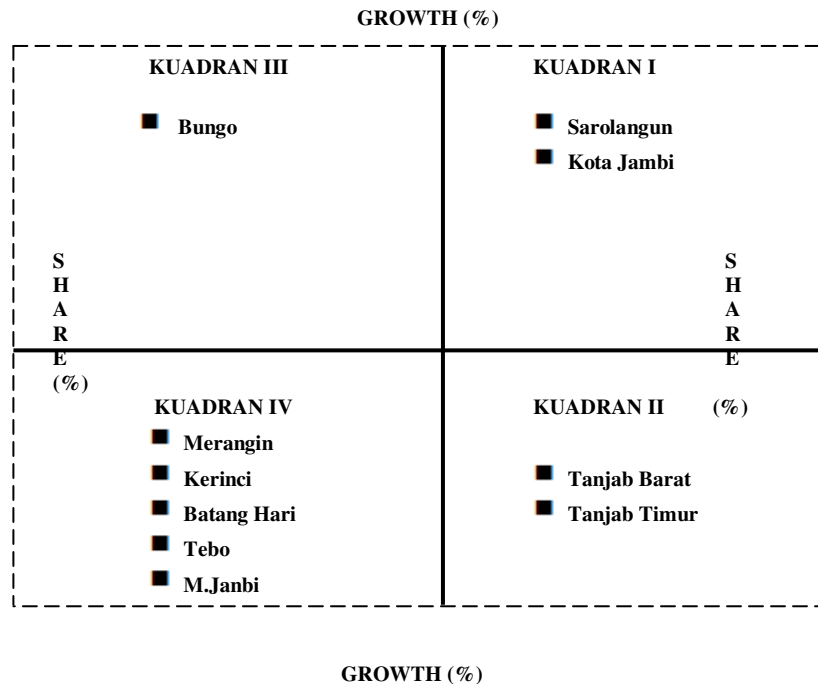
Berdasarkan hasil perhitungan *growth* dan *share* ditampilkan Peta Kinerja PAD sebagai gambaran umum kemampuan keuangan daerah. Peta Kinerja PAD ditampilkan melalui metode Kuadran

Berdasarkan hasil perhitungan *growth* dan *share* dengan menggunakan titik tengah rata-rata daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi diketahui bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang berada pada kuadran I adalah Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun, berarti hanya dua daerah ini yang sangat ideal. PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan besarnya nilai *share* disertai nilai *growth* yang tinggi.

Pada kuadran II adalah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kondisi ini belum ideal, tapi daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD. Sumbangan PAD terhadap APBD (*share*) masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi.

Pada kuadran III adalah Kabupaten Bungo. Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam APBD punya peluang mengecil karena pertumbuhan PADnya kecil. Di sini sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.

Selanjutnya pada kuadran IV adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah belum punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD rendah (Lihat Gbr 2).



Gambar 2. Peta Kinerja PAD Kabupaten Kota di Provinsi Jambi

Kemampuan Keuangan Daerah

Pengukuran kemampuan keuangan daerah digunakan pendekatan indeks kemampuan keuangan daerah, ukuran tingkat kemandirian daerah dan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah

Indeks Kemampuan Keuangan Daerah

Metode Indek Kemampuan Keuangan (IKK) ialah suatu metode guna melihat status kemampuan keuangan berdasarkan *Growth*, *Share* dan *Elastisity*. Berdasarkan tabel 1. diketahui rata-rata *growth* yang tertinggi adalah Kabupaten Batang Hari sebesar 33,81; dan yang terendah adalah Kabupaten Tebo sebesar 6,59. Rata-rata *Share* yang tertinggi adalah Kabupaten Sarolangun sebesar 12,68 dan yang terendah Kabupaten Muaro Jambi sebesar 3,38. Selanjutnya rata-rata *elastisity* tertinggi adalah Kabupaten Batang Hari sebesar 4,50; dan terendah adalah Kabupaten Tebo sebesar 0,73:

Tabel 1. Rata-rata *Growth*, *Share* dan *Elastisity* Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2007 s/d 2011

Kab/Kota	<i>Growth</i> (%)	<i>Share</i> (%)	<i>Elastisity</i> (%)
Kerinci	17,86	4,74	3,05
Bungo	12,32	9,28	1,07
Tebo	6,59	3,78	0,73
Sarolangun	19,66	12,68	2,37
Merangin	16,73	5,47	2,57
Batang Hari	33,81	4,17	4,50
Muaro Jambi	17,20	3,38	2,73
Tanjung Jabung Barat	21,82	4,70	2,63
Tanjung Jabung Timur	16,00	4,68	2,64
Jambi	21,51	10,54	3,28

Sumber: Kabupaten/Kota dalam Angka

Dengan metode IKK, akan diketahui status kemampuan keuangan dari masing-masing kabupaten/kota dan dapat melihat peringkat kemampuan keuangan Kabupaten/kota. Dalam IKK akan membagi kabupaten/kota menjadi tiga status kemampuan keuangan yaitu IKK Tinggi, IKK Sedang dan IKK Rendah.

Tabel 2. Status Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode tahun 2007 s/d 2011

KABUPATEN/ KOTA	INDEK KEMAMPUAN KEUANGAN	STATUS KEMAMPUAN KEUANGAN
Batang Hari	0.695	TINGGI
Kota Jambi	0.664	
Sarolangun	0.638	
Tanjab Barat	0.402	SEDANG
Kerinci	0.392	
Merangin	0.361	
Tanjab Timur	0.441	
Bungo	0.312	RENDAH
Muaro Jambi	0.306	
Tebo	0.014	

Sumber: Kabupaten/Kota dalam Angka

Dapat diketahui bahwa Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) tinggi yaitu Kabupaten Batang hari dengan IKK 0,695; diikuti Kabupaten Sarolangun dengan IKK 0,638; dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 0,402; Untuk Indeks Kemampuan Keuangan

(IKK) sedang terdiri dari Kota Jambi dengan IKK 0,374; diikuti Kabupaten Kerinci dengan IKK 0,392; Kabupaten Merangin dengan IKK 0,361; dan Tanjung Jabung Timur dengan IKK 0,441: Dan untuk Indeks Kemampuan Keuangan rendah terdiri dari Kabupaten Bungo dengan IKK 0,312; diikuti Kabupaten Muaro Jambi dengan IKK 0,306; dan Kabupaten Tebo yang memiliki IKK 0,014:

Tingkat kemandirian daerah

Tingkat Kemandirian daerah atau rasio kemandirian daerah memperlihatkan kesiapan daerah dalam berotonomi atau kemampuan daerah dalam membiayai pembangunannya khususnya dari sumber penerimaan PAD dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Tingkat kemandirian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi untuk tahun 2007-2011 seperti tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Kemandirian Daerah (TKD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Kab/Kota	Rata-rata PAD	Rata-rata Transfer	TKD	Kesimpulan	Pola
Kota Jambi	69331133,6	581268091,2	11,93	Tidak mampu	Instruktif
Kerinci	25683089,8	511516455,8	5,02	Tidak mampu	Instruktif
Merangin	29365983,6	507921037,8	5.78	Tidak mampu	Instruktif
Sarolangun	19061240,2	189559962,6	10,06	Tidak mampu	Instruktif
Batang Hari	21385237,6	481980133	4,44	Tidak mampu	Instruktif
Muaro Jambi	18747353,6	533767558,6	3,51	Tidak mampu	Instruktif
Tanjab Timur	19262012,4	444682071,6	4,33	Tidak mampu	Instruktif
Tanjab Barat	26926364,2	573294070,2	4,70	Tidak mampu	Instruktif
Tebo	17551035,6	456654999,6	3,84	Tidak mampu	Instruktif
Bungo	53041644,2	522940080,2	10,14	Tidak mampu	Instruktif

Sumber : Kab/Kota dalam angka

Berdasarkan tabel 3. dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam berotonomi selama tahun 2007-2011.

Selama periode tersebut tingkat Kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota semuanya rendah sekali (tidak mampu), dengan pola hubungan

instruktif. Ini berarti bahwa kemampuan PAD untuk menopang pendanaan pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi belum mampu untuk berotonomi. Kota Jambi memiliki tingkat kemandirian keuangan yang paling tinggi, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Muaro Jambi.

Kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih sangat rendah. Rasio kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi untuk DOF hanya berkisar antara 3,51% sampai 11,93%, artinya pola hubungan yang instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, hal ini disebabkan betapa dominannya transfer dari pemerintah pusat dalam APBD melalui dana perimbangannya.

Tingkat Ketergantungan daerah

Tingkat Ketergantungan Daerah merupakan rasio dari penerimaan transfer terhadap total penerimaan daerah, semakin besar nilai dari tingkat ketergantungan daerah menunjukkan daerah tersebut belum mampu membiayai belanja daerahnya sendiri dan masih tergantung dari pemerintah pusat, hal ini menunjukkan belum mandirinya daerah tersebut, dan semakin kecil rasio tingkat ketergantungan daerah menunjukkan semakin mandirinya suatu daerah tersebut dalam membiayai belanjanya. Adapun tingkat ketergantungan daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi seperti tabel 4

Tabel 4. Tingkat Ketergantungan Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi periode tahun 2007 - 2011

Kab	PT	TPD	TKtD	Kesimpulan
Kota Jambi	581268091	650599224	89,34	Buruk sekali
Kerinci	511516455	537199545	95,22	Buruk sekali
Merangin	507921037	537287021	94,53	Buruk sekali
Sarolangun	189559962	208621202	90,86	Buruk sekali
Batang Hari	481980133	503365370	95,75	Buruk sekali
Muaro Jambi	533767558	552514912	96,61	Buruk sekali
Tanjab Timur	444682071	463944084	95,85	Buruk sekali
Tanjab Barat	573294070	600220434	95,51	Buruk sekali
Tebo	456654999	474206035	96,30	Buruk sekali
Bungo	522940080	575981724	90,79	Buruk sekali
Rata-rata			94,08	

Sumber: Kabupaten/Kota dalam Angka

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa tingkat ketergantungan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi rata-rata sebesar 94,08%; dan daerah yang terbesar tingkat ketergantungan daerahnya adalah Kabupaten Muaro Jambi dengan TKtD sebesar 96,61%; diikuti Kabupaten Tebo dengan TKtD sebesar 96,309%; Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan TKtD sebesar 95,85%; diikuti Kabupaten Batang Hari dengan TKtD sebesar 95,75%; Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan TKtD sebesar 95,51; diikuti Kabupaten Kerinci dengan TKtD sebesar 95,22%; Kabupaten Merangin dengan TKtD sebesar 94,53%; diikuti Kabupaten Bungo dengan TKtD sebesar 90,80%; Kabupaten Sarolangun dengan TKtD sebesar 90,86%; dan yang terkecil Kota Jambi dengan TKtD sebesar 89,34%.

Tingkat ketergantungan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan nilai rata-rata sebesar 94,077; Berdasarkan kriteria rasio ketergantungan menurut ketentuan Depdagri, bahwa kemampuan keuangan daerah sangat buruk sekali. Diasumsikan bahwa pemerintah daerah belum mampu membiayai pembelanjanya, atau dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, hal ini disebabkan

dominannya transfer dari pemerintah pusat dalam APBD melalui dana perimbangan.

Kondisi pemerintah daerah melalui rasio ketergantungan sudah selayaknya mengupayakan penerimaan lebih besar lagi, terutama melalui PAD dan komponen-komponennya. Perlunya intensifikasi pada sisi penerimaan pajak, investor, dan efisiensi serta efektivitas pada sisi pembelanjaan pada kegiatan yang menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan.

Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Peta kemampuan keuangan daerah ialah suatu metode untuk melihat posisi keuangan daerah kabupaten/kota berdasarkan tingkat kemandirian keuangan daerah dan tingkat ketergantungan keuangan daerah, dengan metode ini akan terlihat apakah daerah berada diatas rata-rata atau dibawah rata-rata daerah kabupaten/kota. Adapun kondisi keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi seperti tabel 5. berikut

Tabel 5. Rata-rata Tingkat Kemandirian dan Tingkat Ketergantungan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2007 s/d 2011

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemandirian (TKD)	Tingkat Ketergantungan (TKtD)
Kota Jambi	11,93	89,34
Kerinci	5,02	95,22
Merangin	5,78	94,53
Sarolangun	10,06	90,86
Batang Hari	4,44	95,75
Muaro Jambi	3,51	96,61
Tanjab Timur	4,33	95,85
Tanjab Barat	4,70	95,51
Tebo	3,84	96,30
Bungo	10,14	90,79
Rata-rata	6,38	94,08

Sumber: Kabupaten/Kota dalam Angka

Berdasarkan tabel 5. dapat ditentukan kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemandirian diatas rata-rata atau dibawah rata-rata dan tingkat ketergantungan diatas rata-rata atau dibawah rata-rata. Adapun klasifikasi kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2007 -2011

Uraian	TKtD _i > TKtD	TKtD _i < TKtD
TKD _i > TKD		Jambi, Sarolangun Bungo
TKD _i < TKD	Kerinci, Tebo, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur	Merangin

Berdasarkan tabel 6, kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang memiliki tingkat kemandirian diatas rata-rata dan tingkat ketergantungan dibawah rata-rata daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi adalah Kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Sarolangun. Sementara kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemandirian dibawah rata-rata dan tingkat ketergantungan dibawah rata-rata daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi adalah kabupaten merangin, dan kabupaten/kota yang memiliki tingkat Kemandirian dibawah rata-rata dan tingkat ketergantungan diatas rata-rata daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Kerinci, KabupatenTebo, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ini berarti Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang mandiri dengan tingkat ketergantungan rendah adalah Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo, sementara kabupaten selain itu memiliki tingkat kemandirian dibawah rata-rata daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan pertumbuhan PAD dan kontribusinya terhadap APBD, secara umum Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun kinerja PAD lebih baik jika dibanding Kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi.

2. Kabupaten Batang Hari, Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun memiliki status kemampuan keuangan tinggi, sedangkan Kabupaten Bungo, Muaro Jambi dan Tebo memiliki status kemampuan keuangan rendah.
3. Dari peta kemampuan keuangan daerah, hanya Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo yang memiliki tingkat kemandirian diatas rata-rata dan tingkat ketergantungan dibawah rata-rata daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Saran

1. Daerah yang berada di kuadran II dan III atau *IKK Sedang*, perlu mendapat dorongan agar PADnya tumbuh. Sementara daerah yang berada di kuadran IV atau *IKK rendah*, tampaknya perlu ada upaya-upaya khusus yang menyentuh penataan berbagai aspek.
2. Keberadaan PAD hendaknya dipahami sebagai hasil ikutan dari tumbuhnya investasi di daerah. Dengan demikian kebijakan peningkatan PAD tidak boleh mengorbankan kepentingan jangka panjang yang berdampak lebih luas yaitu investasi sektor swasta.

DAFTAR PUSTAKA

_____ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

_____ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Deddyk, 2003 Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam era Otonomi Daerah: Tinjauan atas kinerja PAD, dan upaya yang dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.

Halim, Abdul, 2001. *Analisis Deskriptif Pengaruh Fiskal Stress Pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Kompak, No.2 Mei.

_____ 2001, “Anggaran Daerah dan Fiscal Stress : Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia”, JEPI Vol. 16, No. 4, 2001.

<http://www.sikd.djapk.go.id> *Laporan Realisasi APBD Tahun 2004*.

<http://www.Jambi.bps.go.id> Statistik Keuangan Daerah Propinsi Jambi 2010.

Lewis, B.D., 2003. *Some Empirical Evidence on New Regional Taxes and Charges in Indonesia*. Research Triangle Institute. North Carolina. Working Paper.

Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. *Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung. 10 April 2002*.

Susilo, G..T.B., P.H.A., 2007. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah). Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Surabaya.

Utami, A.M., Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Pemerintahan Kota Tasikmalaya) Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.

Usman, 2011 Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

Yovita, F.M., D.C.U., 2011 Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi ,
Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana
Alokasi Umum Terhadap
Pengalokasian Anggaran Belanja
Modal (Studi Empiris Pada

Pemerintah Provinsi Se Indonesia
Periode 2008 – 2010) Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro
[http://eprints.undip.ac.id/29478/1/A
RTIKEL.pdf](http://eprints.undip.ac.id/29478/1/A
RTIKEL.pdf)